

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Batam dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kawasan perdagangan bebas. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya arus perdagangan di Batam yang memicu potensi pelanggaran HKI seperti pemalsuan dan pembajakan barang. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran Bea dan Cukai dalam pelaksanaan mekanisme rekordasi, penegahan, dan penangguhan barang yang diduga melanggar HKI sesuai PP Nomor 20 Tahun 2017 dan PMK Nomor 40/PMK.04/2018. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat KPU BC Tipe B Batam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea dan Cukai berperan tidak hanya sebagai pemungut penerimaan negara, tetapi juga sebagai pengawas terhadap peredaran barang yang melanggar HKI. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, kurangnya integrasi data antara DJBC dan DJKI, serta rendahnya kesadaran pemegang hak untuk mendaftarkan HKI. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem rekordasi, serta penguatan koordinasi dan sosialisasi lintas instansi agar perlindungan HKI di kawasan pabean berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Bea dan Cukai, Batam, Rekordasi, Penegahan, Penangguhan.